**ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini adalah privatisasi dianggap sebagai salah satu solusi perusahaan BUMN dalam meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 terdapat delapan indikator dalam penilaian tingkat kesehatan perusahaan, yaitu: Imbalan Kepada Pemegang Saham ($X\_{1}$), Imbalan Investasi ($X\_{2}$), Rasio Kas ($X\_{3}$), Rasio Lancar ($X\_{4}$), *Colections Periods* ($X\_{5}$), Perputaran Persediaan ($X\_{6}$), Perputaran Total Asset ($X\_{7}$) dan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva ($X\_{8}$).

Penelitian ini membandingkan indikator-indikator penilaian tingkat kesehatan perusahaan non infrastruktur BUMN yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah privatisasi dengan menggunakan *T-test,* dan mengetahui pengaruh kinerja keuangan setelah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan model regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari delapan indikator hanya Perputaran Total Asset yang menunnjukkan adanya perbedaan sebelum dan perusahaan melakukan privatisasi. Dari semua indikator, tidak ada yang menunjukkan pengaruh kinerja keuangan pasca privatisasi dengan penilaian tingkat kesehatan perusahaan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Privatisasi, Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002